



Implementation of the KOTAKU Program: Case Study in Kendari

Oleh:

Andi Muhammad Bathari¹, Rekson Solo Limba dan La Ode Mustafa²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo.

²Dosen Pembimbing Program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo

Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kendari, Indonesia

andibatari21@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to find out and analyze program implementation cities without slums in handling slum houses in Kendari, as well as to investigate and analyze what factors influence implementation city programs without slums in handling slum houses in Kendari. The design of research is descriptive qualitative, the technique of determining internal informants this research is using purposive sampling technique and set at 10 informants. The data collection technique used in this study is a technique observation, interviewing techniques, and documentation. Data analysis techniques in this study was a descriptive data analysis technique, through the technical stages of interactive analysis including reduction data, data presentation and conclusion. The results of this study indicated that the implementation of the KOTAKU program in Kendari, which included improved sanitation, repaired to uninhabitable homes and provision Clean water had been running, but it had not been fully implemented according to the target because of it the program is 100-0-100 and the target of free slum in 2019 has not been achieved. Implementation the KOTAKU program in Kendari was influenced by four factors which included Communication, Disposition, Resources, and Bureaucratic Structure. All of these factors were resulting in a lack of maximum implementation of the KOTAKU program in Kendari.

Keywords: Implementation, Program, No Slum City (KOTAKU)



PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah bagi negara-negara di dunia terutama pada Negara yang sedang berkembang. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu Negara berkembang yang ada di ASEAN masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru. Hampir semua periode pemerintahan yang ada di Indonesia menempatkan masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan.

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Menurut Cheema (1986) dalam pembangunan kota, pemerintah di negara berkembang memiliki 3 tipe kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan kota, yaitu : (1) Menggusur perkampungan kumuh dan rumah-rumah liar yang ada, (2) Mengurangi jumlah daerah perkampungan miskin dengan memindahkan mereka dan menempatkan kembali di daerah baru di luar kota, (3) Melegalisasi perkampungan kumuh dengan renovasi struktur yang ada dan memberikan bantuan dalam perbaikan lingkungan perumahan mereka. Oleh karena itu ketiga tipe kebijakan dalam mengatasi kemiskinan kota tersebut, perencana dan Pemerintah diharapkan untuk berusaha meningkatkan pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi permukiman kumuh dan rumah-rumah liar, sedangkan sesuai peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, pasal 27 yaitu : (1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman; (2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kegiatan-kegiatan : perbaikan atau pemugaran, peremajaan, pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Isi pada pasal 28 yaitu : (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lingkungan permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni; (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat, melaksanakan program peremajaan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni; (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan adalah hak warga negara Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Pencapaian ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumber daya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal melalui platform "Kolaborasi". Oleh karena itu, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, Pemerintah merencanakan sebuah kebijakan strategis yakni program KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU). Program yang pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Perkotaan (PNPM-MP) ini, mulai di realisasikan secara nasional sejak tanggal 27 april 2016 sesuai surat edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) menekankan peran Pemerintah Daerah sebagai



nakhoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara kolaborasi tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mempertemukan proses perencanaan makro (top down) dan perencanaan mikro (bottom up). Rencana yang dibuat tidak hanya berdasarkan pada penyelesaian masalah saat ini tetapi harus dilandaskan pada pencapaian visi penataan permukiman untuk mencapai Kabupaten/Kota Layak Huni dan disesuaikan dengan visi Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan lainnya.

Penyelenggaraan Program KOTAKU di tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mendorong kolaborasi kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berupa pencapaian target sanitasi dan air bersih 100% serta 0 hektar kawasan kumuh di tahun 2019. Lingkungan permukiman kumuh merupakan masalah yang terjadi atau sering dihadapi di kota besar, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga berlangsung di kota-kota besar di dunia (Sri, 1988). Begitupula di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, menurut publikasi World Bank (1999) lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang di antaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai. Kekumuhan lingkungan permukiman cenderung bersifat paradoks, bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, kekumuhan adalah kenyataan sehari-hari yang tidak mereka masalahkan, sedangkan di pihak lain yang berkeinginan untuk menanganinya, masalah kumuh adalah suatu permasalahan yang harus segera ditanggulangi penanganannya.

Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terutama fasilitas sarana dan prasarana masyarakat seperti perumahan, pelayanan sosial, transportasi, air bersih dan lain-lain. Pemerintah Kota telah melakukan langkah awal dengan melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh yang terdapat di beberapa tempat di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari telah memutuskan dan menetapkan untuk melaksanakan upaya pengembangan ruang fisik kota dan peningkatan kualitas prasarana fisik Kota Kendari secara bertahap.

Program KOTAKU pada tataran Implementasinya hingga saat ini masih banyak menemukan kendala, tantangan maupun hambatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Di kota kendari misalnya, meningkatnya titik-titik kawasan kumuh setiap tahunnya menyebabkan pemerintah sebagai nahkoda program, masih kesulitan menemukan formula yang tepat dalam merealisasikan berbagai alternatif kebijakan penanggulangan masalah-masalah yang berkaitan dengan program. Pada tingkatan stake holder kerjasama dan koordinasi multisektoral antara kelembagaan terkait belum terbangun dan terjalin dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab serta para pihak pemangku kepentingan lainnya terkesan berjalan sendiri-sendiri dan mendominasi seluruh aktifitas program. Terlebih lagi belum masuhnya sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak pemerintah memicu polemik dan interpretasi beragam mengenai indikator kota yang kumuh yang semata diterjemahkan sebagai permukiman kumuh. Sementara di beberapa kota besar lainnya, program kotaku telah di kembangkan lebih luas cakupannya pada kawasan kumuh melalui berbagai gagasan terbaru yang kreatif dan inovatif.

"Sasaran program Kotaku adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektar melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Di tempat yang sama, Kepala



Bappeda Kota Kendari Askar mengatakan berdasarkan data luas lahan pemukiman sebesar 490 hektar, terdapat 67.176 unit rumah layak huni, tetapi yang terpenuhi hanya sebanyak 56.742 unit rumah, sehingga dengan jumlah tersebut masih memiliki kekurangan (Back log) sebesar 10.436 unit rumah, sementara jumlah rumah kumuh 3520 unit. "Saat ini untuk Kota Kendari berdasarkan data kekurangan rumah ditambah dengan rumah kumuh berjumlah 13.952 unit rumah," Kata Kepala Bappeda Kota Kendari Askar. Dengan demikian, pihaknya merasa optimis bahwa pada tahun 2019 mendatang program Kotaku akan terwujud, jika pemerintah pusat tetap berkomitmen dalam mencanangkan program tersebut. "Program Kotaku di Kota Kendari bisa terwujud, manakalah ada komitmen dari pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat karena ini anggarannya cukup besar, yaitu lebih 500 Miliar," tukasnya." (sumber www.zonasultra.com Tanggal 29 September 2016)

Berdasarkan hasil pengamatan di atas bahwa di kota kendari masih terdapat rumah kumuh berjumlah 13.952 unit rumah sehingga perlu menjadi perhatian bagi stake holder yang menangani bidang tersebut, realitas sebagaimana yang telah di deskripsikan tersebut idealnya harus sesegera mungkin diatasi sebelum kondisi semakin parah dan sulit terpecahkan. Tentunya melalui program KOTAKU pemerintah kota secepatnya harus dapat merumuskan grein desain serta peraturan perundang-undangan daerah mengenai pengendalian bertumbuh kembangnya kawasan kumuh. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sesuai surat Keputusan Walikota Kendari nomor 389 tentang penentuan lokasi kumuh di Kota Kendari, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Badan Perencanaan Daerah Kota Kendari menyusun Rencana Tindak Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) tahun 2017. Dalam RPLP tahun 2017 ini juga diuraikan mengenai pelaksanaan kerja dan proses pendampingan program. Khusus mengenai pendampingan program ini di legalisasi dengan surat tugas nomor 37 tahun 2017 tentang tenaga pendamping program KOTAKU beserta tugas pokoknya. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan apakah Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kota kendari dapat direalisasikan dengan sebaik baiknya sehingga program pemerintah kota kendari dapat mewujudkan Kota kendari Bebas Kumuh di Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan pada Kantor Sekretariat Program KOTAKU dalam mengimplementasikan program tersebut di Kota Kendari dengan waktu penelitian pada bulan Juli-September 2018. Kurun waktu penelitian yang dimaksud adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik data hasil pengamatan lapangan, data hasil wawancara dan data Dokumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Selain itu, Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Kendari, dengan demikian maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota kendari dan Sekretariat Program KOTAKU. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif, melalui tahapan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Sutopo (2006: 19) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian mulai dari awal hingga berakhirnya pengumpulan data secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Berikut tiga alur kegiatan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data.

Reduksi data adalah berupa proses pemilihan yang memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstrak dan transformasi data yang muncul dari catatan dilapangan (field Note). Reduksi data dikelompokkan menurut kategorinya, yang selanjutnya diklasifikasi untuk ditafsirkan guna memberi makna kepada usaha penarikan kesimpulan penelitian setelah melalui suatu verifikasi.



2. Penyajian data.

Penyajian data sebagai alur penting kedua dari analisis data penelitian kualitatif adalah sebagai penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan.

Menarik kesimpulan adalah kegiatan ketiga analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan-kesimpulan yang pada awalnya mungkin agak kurang jelas, kemudian secara berkelanjutan semakin meningkat secara eksplisit, dan juga memiliki landasan dan dukungan data yang semakin kuat. Setelah itu, kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Kendari

Pembahasan mengenai hasil penelitian secara garis besar terdiri dari dua sub bagian yakni menyangkut program KOTAKU, Implementasi dan faktor yang mempengaruhi program KOTAKU di Kota Kendari. Kedua variabel ini didasarkan pada penelitian lapangan terutama hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang telah ditentukan dan observasi lapangan termasuk pengumpulan dokumen yang relevan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu program nasional atau kebijakan publik diantara beberapa program nasional yang telah di canangkan sebelumnya, baik program KOTAKU yang sudah di realisasikan maupun yang belum di realisasikan hingga saat ini. Sebagai sebuah produk kebijakan nasional Program KOTAKU pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Dengan kata lain Program KOTAKU adalah program baru yang masih berpedoman pada program-program sebelumnya serta lebih di utamakan pada wilayah perkotaan untuk membantu masyarakat perkotaan secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan.

Secara Nasional, keterkaitan Program Kota Tanpa Kumuh dengan program-program lain, disatu sisi program KOTAKU membawa dampak baik secara nasional dengan meningkatkn pertumbuhan ekonomi dalam wilayah perkotaan namun disisi lain juga berdampak buruk pada prioritas-prioritas program pemerintah daerah yang ingin di capai. Hal ini di karenakan tumpang tindih antara masing-masing program dalam pelaksanaannya serta tidak adanya fokus orientasi dan tujuan yang ingin di capai. Kenyataan ini di sampaikan langsung oleh Bapak Arisandi selaku Koordinator KOTAKU kota kendari beliau menyampaikan bahwa :

*“sebelumnya kami pernah terlibat sebagai fasilitator dalam program PNPM-MP dan P2KP bahkan program-program pemberdayaan lainnya. Dari pengalaman tersebut saya simpulkan bahwa keseluruhan program ini sama saja hanya berganti nama saja sehingga muncul kebijakan baru. Sementara proses di lapangan program-program pemerintah masih banyak yang belum tuntas sehingga menyebabkan keterlambatan dan menghalangi program baru yang tujuannya hampir sama”
(Hasil Wawancara, 15 Agustus 2018)*

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa masih terdapat kendala dalam menjalan program KOTAKU sehingga program pembangunan di wilayah perkotaan tidak berjalan secara baik yang di sebabkan oleh perubahan kebijakan dan arah pembangunan. Pada setiap peralihan kekuasaan dan struktur pemerintahan program-program tersebut mengalami perubahan nomen clature dan mengakibatkan terjadi perubahan pada setiap program yang akan di jalankan. Berdasarkan hasil survei pada beberapa program yang telah berjalan sebelumnya, realitasnya menunjukan bahwa program-program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Di Kota Kendari, Khususnya di beberapa kecamatan upaya pencapaian target bebas kumuh juga cenderung sangat sulit untuk dicapai hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama menyangkut bertambahnya jumlah penduduk yang masuk kekota sehingga menimbulkan kepadatan penduduk namun untuk pemukiman tidak memadai sehingga penduduk-penduduk yang masuk kekota membangun rumah-rumah yang tidak layak huni. Sementara disisi lain data mengenai kawasan kumuh belum dimutakhirkan. Sehubungan dengan prediksi tersebut, Masdin, Pemerhati Program KOTAKU menyampaikan bahwa sebagai berikut:

“Sebenarnya kebijakan-kebijakan pemberdayaan yang ada saat ini masih menjadi persoalan pada masyarakat di karenakan bagaimana mungkin program KOTAKU ini bisa mencapai target bebas kumuh , jika sistem pengelolanya masih terjadi tumpang tindih dengan program-program lainnya. Menurut saya, kawasan kumuh di Kota ini bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah di karenakan kepadatan penduduk yang masuk ke kota. Terlebih lagi data base wilaya kumuh juga masih simpang siur dan hanya didasarkan pada data statistik yang belum tentu valid”(Hasil Wawancara, 10 Agustus 2018)

Pernyataan tersebut juga relevan dengan hasil observasi peneliti pada beberapa daerah yang masih tergolong kumuh di Kota Kendari. Bahkan dari hasil *cross chek* data dokumen dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kendari Nomor 389 tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari sebagai revisi SK Nomor 767 tahun 2014, tidak terdapat perubahan sama sekali. Kecamatan-kecamatan sebelumnya yang menjadi lokasi kumuh juga masih mendapatkan penanganan program kumuh. Dengan kata lain SK tahun 2014 dan Tahun 2016 tidak mengalami perubahan sama sekali.

Berdasarkan SK Walikota tersebut tidak semua kelurahan dalam satu kecamatan tertentu menjadi sasaran penanganan kumuh. Dengan kata lain terdapat beberapa perubahan yang tidak memperoleh penanganan program KOTAKU kelurahan yang menjadi sasaran adalah kelurahan yang masuk kategori kumuh sedang hingga tinggi sebagai berikut :

1. Kecamatan Kendari, 9 (sembilan) kelurahan
2. Kecamatan Kendari Barat, 9 (sembilan) kelurahan
3. Kecamatan mandonga, 4 (empat) kelurahan
4. Kecamatan Puwatu, 5 (lima) kelurahan
5. Kecamatan Kadia, 2 (dua) kelurahan
6. Kecamatan wua-wua, 4 (empat) kelurahan
7. Kecamatan Baruga, 4 (empat) kelurahan
8. Kecamatan Kambu, 4 (empat) kelurahan
9. Kecamatan Poasia, 2 (empat) kelurahan
10. Kecamatan Abeli, 10 (sepuluh) kelurahan

(Sumber: Salinan SK walikota No. 767 tahun 2014)

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih sehingga kebijakan merupakan suatu ketetapan guna memberikan pedoman dalam bertindak, yang telah dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu yang pada umumnya berguna bagi banyak pihak. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut perlu diadakan implementasi,



karena tanpa implementasi, maka suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen. Implementasi Program KOTAKU sangat erat kaitannya dengan rumah tidak layak huni, sanitasi dan penyediaan air bersih untuk itu pemerintah merencanakan proses perbaikan terhadap kawasan-kawasan kumuh yang terdapat di kota kendari

Perbaikan Sanitasi

Sanitasi dasar adalah syarat kesehatan lingkungan minimal yang meliputi penyediaan sarana air bersih, sarana pembuangan tinja, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan limbah dan perilaku masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Sanitasi merupakan salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Kendari. Lemahnya kases sanitasi merupakan masalah bagi kawasan permukiman kumuh karena terkait langsung dengan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kendari memberikan perhatian khusus terhadap penanganan sanitasi baik dalam kawasan kumuh maupun kawasan non kumuh. Pembangunan dan pengembangan sanitasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan sistem pengelolaan sanitasi (sektor air limbah, persampahan dan drainase).

1. Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Air Limba yang dimaksud adalah pembuangan tinja keluarga dalam hal ini pengelolaan air limba sebagai pengadaan pembuangan tinja untuk keluarga, standar yang harus di penuhi yaitu memiliki rumah kakus, lantai kedap air dan kakus berbentuk leher angsa agar memenuhi syarat kesehatan.

- a. Memenuhi syarat bila menggunakan kakus leher angsa, lantai kedap air dan punya rumah kakus.
- b. Tidak memenuhi syarat bila tidak menggunakan kakus leher angsa, lantai tidak kedap air dan tidak punya rumah kakus.

(Sumber : Draft Laporan Akhir KOTAKU tahun 2017)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi umum jaringan air limbah masyarakat kota kendari khususnya pada Kecamatan Kendari Barat sekitar 81% yang sesuai persyaratan dan menggunakan jamban keluarga. Sedangkan yang tidak sesuai sekitar 19 yang belum menggunakan jamban untuk buang air besar (BAB).

Tabel 1. Pengelolaan Pelayanan Air Limba Di Kecamatan Kendari Barat Tahun 2017

No.	Keluruahan	KK	Sesuai Persyaratan		Tidak Sesuai Persyaratan
			KK	%	%
1	Dapu-Dapura	462	457	96%	4%
2	Sodohoa	471	367	71%	29%
3	Sanua	747	646	82%	18%
4	Punggaloba	772	639	79%	21%
5	Benu-Benua	370	358	92%	8%
6	Kemaraya	868	812	83%	17%
7	Lahundape	958	741	65%	35%
8	Watu-Watu	661	603	86%	14%



9	Tipulu	710	616	81%	19%
Rata-Rata				81%	19%

Sumber : Laporan Akhir KOTAKU tahun 2017

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa pengelolaan pelayanan air limba di kota kendari khususnya kecamatan kendari barat masih terdapat beberapa KK yang belum menggunakan Jamban untuk Buang Air Besar (BAB). Kelurahan Terbesar yang belum menggunakan Jamban Keluarga untuk BAB adalah Kelurahan Sodohoa yaitu sekitar 29% KK yang belum menggunakan. Kelurahan Sodohoa merupakan kawasan bantaran sungai yang mana pada umumnya masyarakat di kelurahan tersebut masih memanfaatkan bantaran sungai sebagai wadah untuk membuang air limba masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan mengungkapkan bahwa:

"Fenomena dilihat pada masyarakat pinggiran sungai dan daerah Bantaran Sungai. bisa jadi semua ini karena faktor kebiasaan dimana di wilayah sekitar aliran sungai dan daerah, sebenarnya ada warga yang telah memiliki jamban tapi saluran pembuangannya tetap dialirkan langsung ke sungai laut bukan memakai septic tank" (Hasil Wawancara, 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas menunjukkan bahwa kondisi umum jaringan air limbah masyarakat Kota Kendari khususnya pada kawasan kumuh umumnya sudah menggunakan jamban, walau terlihat ada sebahagian kecil masyarakat yang pinggiran sungai dan daerah pesisir masih menerapkan kebiasaan saluran pembuangannya tetap dialirkan langsung ke sungai laut bukan memakai septic tank. Namun demikian bahwa di Kota Kendari sudah mengupayakan pengolahan air limbah sesuai aturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan sistem onsite. Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara dengan salah seorang informan mengungkapkan bahwa:

"Secara umum sistem pengolahan air limbah di Kota Kendari menggunakan sistem onsite "(Hasil Wawancara, 27 Agustus 2018)

Hasil penelitian dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengolahan sanitasi melalui pengolahan jaringan air limbah masyarakat Kota Kendari sudah dilaksanakan dengan baik dimana pada Kecamatan Kendari Barat ada sekitar 81 % yang mempunyai dan menggunakan jamban keluarga dengan sistem pengolahan air limbah menggunakan sistem onsite, yaitu merupakan suatu sitem pengelolaan air limbah dimana *black water* dan *grey water* dikumpulkan dan diolah dalam lahan milik pribadi dengan teknologi seperti tangki septic.

2. Pengolahan sampah

Pengelolaan Pembuangan sampah didefinisikan sebagai pengadaan jenis dan sistem pembuangan sampah yang didapat dalam pengamatan terhadap responden dalam hal ini meliputi dumping, dumping in water, landfill, inceneration atau sanitari landfill.

- Memenuhi syarat bila kontruksinya kuat, tidak bocor, mempunyai tutup dan dapat diangkat oleh satu orang.
- Tidak memenuhi syarat bila kontruksinya tidak kuat, bocor, tidak mempunyai tutup.
(Laporan Akhir KOTAKU tahun 2017)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa pemerintah Kota Kendari telah melakukan pengelolaan sampah baik di pusat kota maupun pada kawasan bataran sungai dan daerah pesisir Khususnya Di



kecamatan Kendari barat namun belum optimal. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2. Pelayanan Persampahan Di kecamatan Kendari Barat Tahun 2017

No.	Kelurahan	Klaster	Sampah Terangkut		Sampah Tidak Terangkut
			KK	%	%
1	Dapu-Dapura	Kawasan Pusat Kota	457	96%	4%
2	Sodohoa	Kawasan Bataran Sungai	367	71%	29%
3	Sanua	Kawasan Bataran Sungai	646	82%	18%
4	Punggaloba	Kawasan Bataran Sungai	639	79%	21%
5	Benu-Benua	Kawasan Bataran Sungai	358	92%	8%
6	Kemaraya	Kawasan Bataran Sungai	812	83%	17%
7	Lahundape	Kawasan Bataran Sungai	741	65%	35%
8	Watu-Watu	Kawasan Bataran Sungai	603	86%	14%
9	Tipulu	Kawasan Bataran Sungai	616	81%	19%
Rata-Rata				81%	19%

Sumber : Laporan Akhir KOTAKU 2017

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Kecamatan Kendari Barat yang berada pada kawasan perkotaan khususnya kelurahan Dapu-Dapura pengelolaan sampahnya sampai 96%, namun ada beberapa kelurahan yang masuk dalam kawasan klaster Bantaran sungai khususnya kelurahan Benu-Benua pengelolaan sampahnya hanya mencapai 8%, artinya bahwa pada kawasan ini merupakan kawasan yang tidak terjangkau. hal ini didukung pula dengan hasil wawancara dengan salah seorang informan mengungkapkan bahwa:

"Pemerintah Kota Kendari berupaya terus menerus dalam peningkatan pengelolaan sampah baik dipuast Kota maupun pada kawasan bataran sungai dan daerah pesisir yang belum terjangkau dengan pelayanan kebersihan"(Hasil Wawancara, 27Agustus 2018)

Lebih lanjut pada hasil wawancara dengan salah satu informan mengungkapkan bahwa:

"Secara umum pengelolaan sampah oleh masyarakat pada tatanan rumah tangga di Kota Kendari khususnya pada kawasan perumahan dan permukiman kumuh saat ini dengan metode pengumpulan sampah lalu dibuang ke TPS, disamping itu metode membakar sampah juga cukup tinggi. selain membakar sampah, metode membuang sampah ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk pada beberapa kawasan cukup dominan"(Hasil Wawancara, 27 Agustus 2018)

Dari hasil penelitian dan wawancara diatas menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai pariah adipura kencana terus berupaya dalam peningkatan pengelolaan sampah baik di pusat Kota maupun pada kawaasan bataran sugai yang belum terjangkau dengan pelayanan kebersihan. Secara umum pengelolaan sampah oleh masyarakat pada tatanan rumah tangga di Kota Kendari khususnya pada kawasan perumahan dan permukiman kumuh saai ini dengan metode mengumpulkan sampah lalu di buang ke TPS, di samping itu



metode membakar sampah juga cukup tinggi. Selain membakar sampah, metode membuang sampah ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk pada beberapa kawasan cukup dominan.

3. Pengolahan Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai bangunan yang sangat diperlukan untuk mengalirkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsure dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan air tanah) dan atau bangunan serapan.

Tabel 3. Pembangunan Drainase Kecamatan Kendari Barat Tahun 2017

No.	Kelurahan	Klaster	Kondisi Baik %	Target Pembangunan Drainase	Realisasi Pemabungan Drainase
1	Dapu-Dapura	Kawasan Pusat Kota	63%	2	2
2	Sodohoa	Kawasan Bataran Sungai	13%	2	2
3	Sanua	Kawasan Bataran Sungai	31%	5	4
4	Punggaloba	Kawasan Bataran Sungai	23%	4	4
5	Benu-Benua	Kawasan Bataran Sungai	47%	2	2
6	Kemaraya	Kawasan Bataran Sungai	72%	3	2
7	Lahundape	Kawasan Bataran Sungai	64%	5	3
8	Watu-Watu	Kawasan Bataran Sungai	49%	2	2
9	Tipulu	Kawasan Bataran Sungai	36%	3	3

Sumber : SIAP NUSP-2 Kota Kendari

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota kendari telah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan drainase yang terdapat pada kecamatan Kendari barat khususnya pada kelurahan Lahundape, target pembagunan drainase pada kelurahan lahundape pada tahun 2017 adalah 5 paket namun yang di realisasikan hanya 3 paket ini disebabkan pada pengaruh anggaran yang di alihkan ke pembanguna lain.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang informan mengungkap bahwa:

"Kondisi anggaran pada pembuatan drainase terkadang belum mencukupi di karenakan anggaran tersebut di alihkan ke pembangunan lain sehingga yang di rencanakan kadang tidak sesuai dengan realisasi yang di harapkan" (Hasil Wawancara ,28 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan drainase pada kelurahan lahundape telah di laksanakan sesuai dengan perencanaan namun target yang di capai belum maksimal di karenakan anggaran pada pembagunan drainase di alihkan ke pembungan lain.



Pemerintah Kota Kendari telah melakukan pengolahan sanitasi lingkungan melalui pengolahan drainase dengan kondisi drainase terbaik ditemukan pada kawasan pesisir khususnya pada kelurahan Mata dan Purirano dengan kondisi 100% baik. Sedangkan pada kawasan bantaran sungai mencakup kelurahan Sodoha, Sanua, Punggaloba, dan Benu-Benu memiliki kondisi drainase terburuk dengan persentase 13-47% baik. Data kondisi drainase ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kendari sudah melakukan upaya pengolahan drainase namun belum mencapai kondisi maksimal khususnya pada kawasan bantaran sungai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang informan mengungkapkan bahwa;

"Kondisi drainase pada kawasan permukiman kumuh khususnya pada sekitar kawasan bantaran sungai di Kota Kendari tidak dapat berfungsi sebagai permukaan secara optimal karena sebagian kondisinya telah mengalami kerusakan, disamping itu ada beberapa sistem jaringan drainase yang kapasitasnya telah melebihi daya tampung dan bahwa ada sebagian yang masih sifatnya saluran alami atau saluran tanah " (Hasil Wawancara ,27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kendari sudah melakukan upaya pengolahan drainase namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya lokasi dan atau kawasan khususnya disekitar kawasan bantaran sungai yang memiliki kondisi drainase yang kondisinya baikknya hanya mencapai persentase 13-47% baik . Dengan demikian bahwa kondisi drainase pada kawasan permukiman kumuh khususnya pada sekitar kawasan bantaran sungai di Kota Kendari tidak dapat berfungsi sebagai pengatur air hujan atau dengan kata lain tidak dapat mengalirkan air permukaan secara optimal karena sebagian kondisinya telah mengalami kerusakan, disamping itu ada beberapa sistem jaringan drainase yang kapasitasnya telah melebihi daya tampung dan bahkan ada sebagian yang masih sifatnya saluran alami atau saluran tanah.

Kegiatan pembangunan dan pengembangan sanitasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan sistem pengelolaan sanitasi baik dari sektor limbah, persampahan, maupun drainase. Namun demikian, bahwa untuk pelayanan sanitasi di Kota Kendari masih terdapat beberapa kekurangan terutama dikawasan bantaran sungai dalam hal ini pemerintah berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan sanitasi di Kota kendari terutama pelayanan pengolahan air limbah menggunakan sistem onsite, pengolahan persampahan melalui metode (mengumpulkan sampah lalu di buang ke TPS, metode membakar sampah, dan metode membuang sampah ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk pada beberapa kawasan cukup dominan), serta pengolahan drainase khususnya pada kawasan bantaran sungai yang telah mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagai mana mestinya.

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Persebaran penduduk kota kendari yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial pada wilayah tertentu sehingga mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh di berbagai wilayah. Pemukiman kumuh tersebut menimbulkan masalah kesehatan karena sulitnya mendapatkan air bersih yang layak dan tidak adanya sanitasi yang memadai. pencemaran lingkungan juga terjadi karena limbah rumah tangga dibuang begitu saja.

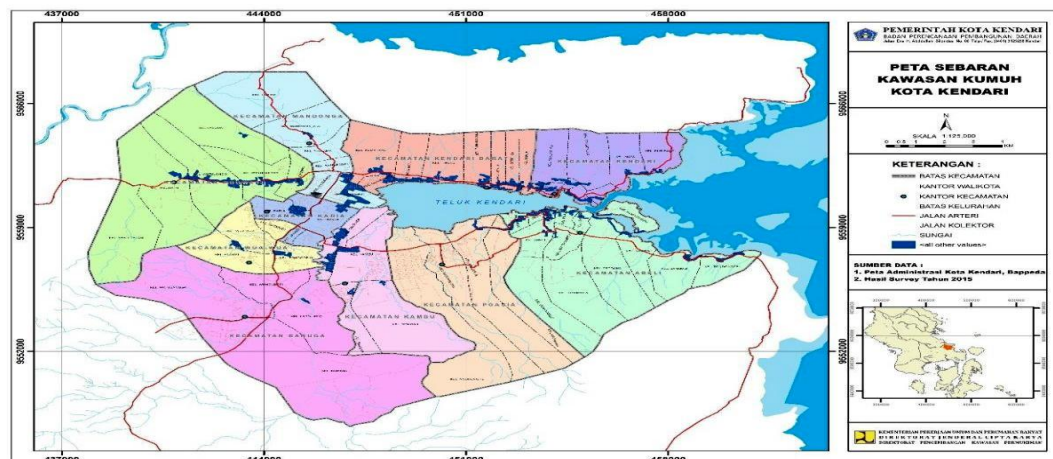
Problematika tentang lingkungan perumahan dan pemukiman terjadi karena tidak seimbangnya ketersediaan lahan dengan pertambahan penduduk. Sebaran pemukiman kumuh di Kota Kendari pada umumnya dicirikan dengan permukiman yang padat penduduk dengan kualitas lingkungan dan infrastruktur yang kurang memadai.



Kawasan kumuh di Kota kendari memiliki luas 497,27 ha yang tersebar dalam 55 kelurahan dengan tiga klaster yaitu klaster pusat kota, klaster bantaran sungai dan klaster kawasan pesisir. Kawasan kumuh tersebut mengalami penurunan kualitas atau memburuk (*deteriorated*) baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya.

Perumahan dan pemukiman tersebut tumbuh dan berkembang dengan kualitas perumahan di bawah standar minimal (jalan lingkungan, sanitasi dan air minum). Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh tidak hanya dilakukan perbaikan dari aspek fisik akan tetapi juga diperlukan adanya perhatian terhadap bagaimana menggerakkan kegiatan sosial, ekonomi, kelembagaan dan komonitas agar kehidupan masyarakat dapat terangkat. Kegiatan ini harus ditangani secara bersama-sama oleh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian maka sebaran kawasan perumahan kumuh di Kota Kendari dapat dilihat pada Gambar 1. berikut :

Gambar 1. Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Kendari



Sumber : SIAP NUSP-2 Kendari

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kota Kendari seluas 395.20 ha. Hal ini sesuai dengan SK Walikota Kendari No. 747 Tahun 2014 tentang penetapan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Kendari. Namun, berdasarkan hasil verifikasi kawasan kumuh meningkat menjadi 497,27 ha bertambah (Tabel 4.13, Laporan Akhir KOTAKU 2017)

Kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang muncul pada kawasan pusat kota akibat dari kualitas perekonomian yang makin rendah dan padatnya permukiman seta pesatnya laju pertumbuhan penduduk karena faktor urbanisasi, sehingga terjadi pemakaian lahan-lahan kosong yang berada di pusat kota yang dibangun tanpa adanya peraturan dan perencanaan. Urbanisasi dalam wilayah kota Kendari telah memberi dampak negatif terhadap perkembangan kota yaitu meningkatnya kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang akhirnya menimbulkan kawasan permukiman kumuh karena tidak seimbangnya antara laju peningkatan jumlah penduduk dengan laju pembangunan fasilitas perumahan tidak seimbang. Tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dengan permintaan akan memberi dampak terhadap kualitas infrastruktur seperti luasan rumah tempat tinggal dibawah 6 m²/orang dan secara langsung tidak atau kurang memiliki akses terhadap pelayanan umum lainnya seperti air bersih, sanitasi dan lain-lain.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak



huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya didaerah pemukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu factor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kinerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi dilihat sebagai proses linear yang menggambarkan adanya proses pemindahan sesuatu yang kongkret dari suatu tempat ketempat lain. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang konkrit dan relatif bersifat tetap, sehingga ketika dipindahkan akan tetap dengan jumlah yang sama dan relatif bersifat tetap. Proses Komunikasi terdiri dari beberapa elemen yang dapat di gunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini yaitu :

1. Transmisi atau Penyampaian Informasi

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai Program Kotaku kepada pemerintah, swasta dan masyarakat. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi merupakan upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai Program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU kepada masyarakat. Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur kebijakan, visi misi program, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Program KOTAKU kepada masyarakat luas dalam hal ini pemanfaatan program kotaku dalam mengatasi rumah kumuh, sanitasi dan air bersih.

Proses penyampaian informasi dilakukan antara pembuat kebijakan dengan implementor menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga implementor tidak mengalami kesalahan dalam mengimplementasikan program. Berdasarkan penjelasan dari Koordinator Kota Tanpa Kumuh, Bapak Arisandi, SE, MH yang menyatakan bahwa :

"Proses Penyampaian Informasi kepada implementator mengenai tata cara pelaksanaan program KOTAKU yaitu melalui rapat koordinasi yang di lakukan di tingkat kota, dalam rapat koordinasi tersebut juga dijabarkan lebih lengkap tentang materi-materi yang berkaitan dengan program KOTAKU dan implementasinya di masyarakat kota Kendari, selanjutnya Pemerintah kota Kendari juga memfasilitasi di setiap tingkatan untuk mensosialisasikan program kota tanpa kumuh kepada seluruh elemen masyarakat terutama Kecamatan dan Kelurahan yang masih terdapat rumah kumuh dan sanitasi yang kurang baik serta kurangnya air bersih yang tersedia." (Hasil Wawancara, 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di ketahui bahwa penyampain informasi kepada pelaksana di Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat telah di sampaikan selanjutnya tim program kotaku melaksanakan



rapat koordinasi dengan melibatkan pemerintah kota Kendari serta masyarakat setempat untuk menyampaikan isi dan tujuan program kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami program tersebut.

Berkaitan dengan pendapat diatas dimana hasil wawancara dengan pak Rimba selaku Urban Planner KOTAKU mengatakan bahwa :

"Pemerintah Kota Kendari sudah beberapa kali melakukan sosialisasi baik kepada Pihak-Pihak terkait (Pemerintah, masyarakat, dan Swasta) dimana sosialisasi tersebut dapat dilihat dengan berbagai peraturan-peraturan daerah dan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Kota Kendari yang merujuk pada peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang menunjang pelaksanaan program KOTAKU dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Kota Kendari." (Hasil wawancara, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pemberian informasi program kotakku telah di lakukan dengan baik oleh pihak Sekretariat Kota Tanpa Kumuh sehingga adanya sosialisai kepada pihak-pihak terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kemudian adapun komunikasi penyampain informasi yang di lakukan antara Kordinator KOTAKU dengan pemerintah serta masyarakat dalam melaksanakan implementasi program KOTAKU ini. Komunikasi yang berupa penyampain informasi ini di lakukan oleh KORKOT selaku pimpinan dari Sekretaria Kotaku. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan Koordinator KOTAKU Kota Kendari, Beliau Menyebutkan :

"Penyampaian informasi yang dilakukan Sekretariat KOTAKU sudah berjalan dengan baik dan lancar, penyampaian informasi ini salah satunya berupa tujuan dan sasaran dari program KOTAKU serta melakukan identifikasi kelembagaan masyarakat dan keaktifan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses implementasi program KOTAKU karena implementasi atau pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat bergerak salah satunya ialah dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka agar program KOTAKU dapat berkelanjutan dan berjalan secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan." (Hasil wawancara, 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai penyampaian informasi yang dilakukan antar Sekretariat KOTAKU dengan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengimplementasikan program KOTAKU sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara Sekretariat KOTAKU dan pemerintah serta swasta dan masyarakat dimana dalam proses penyampaian informasi tersebut masyarakat diberikan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program KOTAKU agar dapat berkelanjutan dan berjalan maksimal

Kejelasan Informasi

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkannya suatu komunikasi yang benar-benar jelas.

Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam kebijakan tersebut. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam



suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparaturnya maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparaturnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini di kemukakan oleh Bapak Takwin Selaku Asisten Koordinator Kota Bidang Kelembagaan dan Kolaborasi mengatakan bahwa:

"Petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang mesti dilakukan oleh pelaksana, sejauh ini sudah jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, semuanya sudah tahu apa yang menjadi kewajiban masing - masing dan prosedur pelaksanaannya. Selain itu, fasilitator dan pelaksana pada Kelurahan juga sudah dibekali dengan buku petunjuk pelaksanaan yang juga terdapat pelatihan penyegaran bagi mereka dalam rangka pemahaman akan pentingnya program KOTAKU ini bagi warga masyarakat." (Hasil Wawancara, 28 Agustus 2018)

Berdasarkan Penjelasan diatas, dapat di katakan bahwa kejelasan informasi sejauh ini sudah lebih baik, selain itu semuanya telah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan pelatihan penyegaran. Dengan adanya kejelasan informasi mengenai tujuan dan pelaksana program KOTAKU maka di harapkan dapat mendukung pencapaian tujuan program tersebut dan manfaatnya bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program KOTAKU di Kota Kendari yang meliputi perbaikan sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan air bersih sudah berjalan , namun belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan target kerena program 100-0-100 dan target bebas kumuh di tahun 2019 belum dicapai;
2. Implementasi program KOTAKU di Kota Kendari dipengaruhi empat faktor yang meliputi Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya, dan Struktur Birokrasi. Keseluruhan faktor tersebut yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan program KOTAKU di Kota Kendari.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan penelitian yang telah ditetapkan, maka selaku penulis menyarankan:

1. Pemerintah daerah seharusnya bersungguh-sungguh dalam mensukseskan program KOTAKU di Kota Kendari dengan memaksimalkan pencapaian program 100-0-100 dan target bebas kumuh di tahun 2019 melalui perbaikan sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan air bersih.
2. Untuk memaksimalkan kinerja para actor dalam implementasi program KOTAKU maka pemerintah Kota Kendari yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan program KOTAKU harus membangun strategi:
 - a. Memaksimalkan sistem informasi dan komunikasi lintas sektor dan antar aktor yang bertanggung jawab dalam implementasi program agar tersedia data dan informasi mengenai kawasan kumuh dan penanganannya yang valid dan terkini, yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan serta perencanaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh . Sistem informasi bermanfaat untuk mengukur perkembangan pencapaian target setiap tahun, sharing informasi yang digunakan oleh seluruh pelaku, menjadi sistim informasi komunikasi, alat pengembagan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan



- masyarakat dan pemerintah daerah serta sarana berbagai informasi ketersediaan sumberdaya diantara pelaku.
- b. Membangun kelembagaan penanganan di pusat dan daerah; penanganan permukiman kawasan kumuh dapat berjalan efektif dan efisien, membutuhkan dukungan seluruh pelaku yang berjalan dalam sistem yang disepakati bersama. Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kesepahaman bersama antar pelaku, komitmen dari seluruh pelaku, Kemitraan antar pelaku: antar bidang pembangunan, anatar pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor dan kemitraan dengan pelaku lainnya.
 - c. Membangun dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai pelaku utama yang menentukan keberhasilan peningkatan kualitas permukiman kumuh
 - d. Membangun kesadaran, peran, dan kapasitas masyarakat agar terjadi keberlanjutan hasil dari penaganaan permukiman kumuh, maka peran masyarakat menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono.2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- A.G Subarsono.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Hariyanto, Asep. 2015. *Stategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang*. Jurnal PWK Unisba.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Purwanto dalam Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen PU 2005 Modul hal.1
<https://zonasultra.com/pengamat-program-kotaku-lebih-mudah-dipahami-masyarakat.html>
Media Tata Ruang.com